

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menyelenggarakan sistem pemilihan umum secara kompetitif sejak peristiwa pengunduran Presiden Soeharto pada Mei 1998 (Sherlock, 2004). Penyelenggaraan pemilu tersebut berpengaruh terhadap politik, sosial, dan ekonomi. Pemilu tersebut dianggap sebagai sistem pemilu peralihan antara masa Orde Baru dengan reformasi (Pamungkas, *et al.*, 2019). Sulawesi Selatan juga menerapkan sistem pemilihan umum selama masa peralihan tersebut. Adapun fenomena dalam masa transisi tersebut melahirkan calon kepala daerah yang berasal dari keturunan bangsawan lokal yang memiliki berbagai gelar dan berimplikasi pada hasil pemilu di Sulawesi Selatan (Burhaman, 2019). Terdapat beberapa daerah yang memiliki kelompok bangsawan yang sangat kental di antaranya adalah Kabupaten Wajo. Peserta pemilu dengan gelar sebagai bangsawan dijadikan modal besar untuk meraih suara atau kepercayaan masyarakat (Rismawidiawati, 2016). Sejak periode transisi dalam sistem pemilu, Sulawesi Selatan sejak awal sudah menganggap bahwa pentingnya modalitas dilihat dari unsur-unsur budaya, identitas, etnis, dan agama (Armunanto, 2015).

Pemilihan umum merupakan mekanisme yang di dalamnya menawarkan sebuah bentuk keterwakilan yang bertujuan untuk mewakili kepentingan sebuah populasi (Malleon, 2018). Pemilihan umum dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya *pluralism* dan sikap saling percaya serta saling menghargai (Aspinall & Mietzner, 2019b; Moten, 2000; Warren, 2018). Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi terus berusaha memajukan kualitas demokrasi melalui sebuah sistem pemilihan umum secara serentak (Arrsa, 2014). Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beberapa tingkat, mulai dari tingkat nasional, regional hingga

pemilihan di tingkat lokal dalam satu hari pemungutan suara (Mattila, 2003; Arrsa, 2014). Adapun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mulai dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sejak tahun 2015 (Chaniago, 2016).

Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, calon atau peserta dibolehkan maju melalui jalur independen dan juga melalui usungan partai politik (KPU, 2017). Adapun usaha untuk mendapatkan dukungan partai politik juga dibutuhkan proses kandidasi bagi para calon yang dilakukan oleh partai politik. Kandidat yang dicalonkan oleh partai politik atau koalisi partai juga mempertimbangkan beberapa aspek antara lain, kualitas kandidat, popularitas kandidat, kompetensi kandidat, kapabilitas kandidat, dan termasuk di dalamnya terkait moralitas kandidat, atau dengan kata lain bahwa modal kandidat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain (Purwaningsih, 2015; Putri & Muradi, 2017; Baharuddin & Purwaningsih, 2017). Dari penjelasan tersebut dapat dianggap bahwa modal yang dimiliki oleh calon atau kandidat juga merupakan faktor penentu untuk mendapatkan dukungan politik dan juga dukungan masyarakat pada proses pemilihan umum.

Modal sangat diperlukan dalam sebuah arena pertarungan politik. Bourdieu mendefinisikan modal sebagai keseluruhan sumberdaya aktual maupun potensial yang dimiliki seseorang (Syahra, 2003). Modal seperti modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat *modern* terhadap upaya pembangunan manusia, ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi (Fukuyama, 2002). Dalam kajian modal, kepercayaan (*trust/social trust*) menjadi hal dominan dalam berbagai tujuan pada setiap pembangunan modal, yang didasari oleh suatu pola tindakan yang saling mendukung dan dapat membantu membangun hubungan relasi sosial yang lebih kooperatif (Putnam, 1993; Putnam, 2000; Putnam, 2002; Newton, 2001; Fisher, 2013). Kepercayaan dapat

dibentuk melalui keanggotaan di dalam masyarakat, adanya hubungan relasi, jejaring, dan aliansi (Pret et al., 2016). Kepercayaan (trust) tidak tumbuh dengan waktu yang singkat, melainkan melalui proses panjang melibatkan hubungan antar aktor yang terhimpun dalam kelompok atau komunitas (Usman, 2018).

Dalam kontestasi politik, kandidat tidak hanya dapat mengandalkan popularitas dan juga figuritasnya, tetapi juga diperlukan modal berupa hubungan relasi untuk memperoleh kepercayaan dan partisipasi politik masyarakat. Modalitas dalam kontestasi politik selain peran figur atau modalitas kandidat, juga sangat ditentukan oleh beberapa modalitas lainnya seperti modal politik yaitu dukungan partai politik dan elit politik (Baharuddin & Purwaningsih, 2017; Solihah et al., 2019). Seperti yang dijelaskan juga bahwa modal seperti modal politik berpengaruh pada proses pemilihan umum untuk menghasilkan tindakan politik (Casey, 2008). Adapun dalam pemilihan umum juga membutuhkan biaya besar dalam melakukan kampanye dan mobilisasi massa untuk membiayai semua tahapan pada saat pemilihan berlangsung. Maka dengan demikian, juga diperlukan modal ekonomi sebagai kesanggupan dana politik oleh kandidat (Baharuddin & Purwaningsih, 2017).

Penelitian ini mengambil studi kasus di Sulawesi Selatan yaitu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) di Kabupaten Wajo tahun 2018. Studi ini menganalisis kemenangan kandidat Amran Mahmud sebagai bupati terpilih. Kontestasi pada pilkada Kabupaten Wajo diikuti oleh 2 pasangan kandidat yaitu Amran Mahmud - Amran dan Baso Rahmanuddin - Anwar Sadat Bin Abdul Malik (KPU, 2018c). Amran Mahmud adalah seorang mantan Anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2004-2009, dan sekaligus mantan Wakil Bupati Kabupaten Wajo periode 2009 – 2014 (KPU, 2018c). Pada Pilkada tersebut, Amran Mahmud berpasangan dengan seorang pengusaha yaitu

Amran yang dinilai sebagai tokoh praktisi dan memiliki kompetensi serta kemampuan manajerial dalam bidang ekonomi.

Adapun kandidat lain yaitu Baso Rahmanuddin merupakan seorang Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (KPU, 2018c). Popularitas yang dimiliki Baso Rahmanuddin pada Pilkada Wajo 2018 juga dipengaruhi oleh faktor politik kekerabatan atau keluarga. Baso Rahmanuddin merupakan menantu dari mantan bupati 2 periode di Kabupaten Wajo yaitu Andi Burhanuddin Unru. Andi Burhanuddin Unru menjabat sebagai bupati periode 2009-2014 dan 2014-2019, dan merupakan tokoh politisi senior Partai Golkar. Ayah Burhanuddin Unru juga merupakan mantan bupati Wajo tahun 1967-1978 (Dinas Kominfo & Statistik, 2020). Adapun pasangan Baso Rahmanuddin, Anwar Sadat Bin Abdul Malik dikenal sebagai seorang ulama. Anwar Sadat Bin Abdul Malik juga merupakan Putra dari Ulama Besar Wajo yang juga sebagai mantan Pimpinan Pesantren As'adiyah yakni Anre Gurutta Haji (AGH) Abd Malik Muhammad (Tribun Timur, 2017). Pesantren As'adiyah merupakan kiblat dan pusat Islam di Sulawesi Selatan (Darlis, 2016), adapun As'adiyah memiliki afiliasi dengan Nahdlatul Ulama (As'ad, 2018).

Pasangan kandidat yang maju saat itu, baik Amran Mahmud - Amran dan Baso Rahmanuddin - Anwar Sadat merupakan kandidat yang merepresentasikan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo yaitu Muhammadiyah yang relatif cenderung dekat kepada Amran Mahmud karena merupakan tokoh Muhammadiyah, sedangkan organisasi keagamaan lainnya yaitu Nahdlatul Ulama lebih dekat dengan Anwar Sadat. Adapun Nahdlatul Ulama yang identik dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja), telah masuk di Sulawesi Selatan pada abad ke-13 dan didakwahkan oleh Ulama Aswaja, Sayyid Jamaluddin al-Akbar di Tosora, wilayah Bugis Wajo (Suyuti, 2016). Hal ini diklaim

menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai komunitas keagamaan yang populer di Kabupaten Wajo. Sedangkan Muhammadiyah melakukan aktivitas dakwahnya baru dimulai pada tahun 1926 (PWM Sulawesi Selatan, 2021). Berdasar pada uraian tersebut, pasangan Baso Rahmanuddin yang berpasangan dengan Anwar Sadat merupakan kandidat yang cukup diuntungkan karena adanya kecenderungan pada afiliasi dengan Pesantren As'adiyah dan Nahdlatul Ulama.

Adapun keuntungan lain yang dimiliki Baso Rahmanuddin-Anwar Sadat di antaranya seputar modal ekonomi yang unggul dari kandidat lainnya, di mana pada saat itu, kandidat lainnya yakni Amran Mahmud memiliki laporan harta kekayaan yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kandidat bupati lainnya yaitu Baso Rahmanuddin (Tribun Wajo, 2018). Pada pilkada tersebut, pasangan Amran Mahmud - Amran juga memiliki jumlah pengeluaran dana kampanye yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kandidat lainnya (KPU, 2018b).

Tabel 1.1 Laporan Harta Kekayaan dan Dana Kampanye

Pasangan Calon	Harta Kekayaan	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye
Amran Mahmud Amran	Rp 1.3 Miliar Rp 14 miliar	Rp 1.213.721.500
Baso Rahmanuddin Anwar Sadat	Rp 3,7 miliar Rp 7,9 miliar	Rp. 1.946.325.000

Sumber: Situs Web dan Portal Berita (KPU, 2018b; Tribun Wajo, 2018)

Pasangan Baso Rahmanuddin - Anwar Sadat juga didukung oleh Partai Golkar, PKB, Gerindra dan Hanura (KPU, 2018c). Adapun Partai Golkar merupakan partai yang cukup mendominasi di pilkada Kabupaten Wajo pada 2 periode pemilihan sebelumnya. Adanya dukungan politik dari Partai Golkar kepada Baso Rahmanuddin-Anwar Sadat juga dianggap sangat menguntungkan dalam pemilihan. Adapun

pasangan Amran Mahmud – Amran didukung oleh koalisi partai politik dari Partai PPP, PAN, PKS, PBB, PDI-P, Partai Demokrat dan Nasdem. Berikut adalah dukungan politik dan hasil perolehan suara pada pilkada Kabupaten Wajo tahun 2018.

Tabel 1.2 Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Pasangan Calon	Dukungan Partai Politik	Perolehan Suara	
			Pemilih	%
1	Amran Mahmud – Amran	PPP, PAN, PKS, PBB, PDI-P, Partai Demokrat, dan Nasdem	130.035	57,95 %
2	Baso Rahmanuddin - Anwar Sadat	Partai Golkar, PKB, Gerindra, dan Hanura	94.340	42,5 %

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2018a)

Baso Rahmanuddin - Anwar Sadat juga memiliki modal ekonomi yang relatif besar, ditambah dengan adanya dukungan kekuatan politik dari partai pemenang (Golkar), dan dukungan politik kekerabatan serta memiliki afiliasi keagamaan yang populer di Kabupaten Wajo, namun belum mampu memengaruhi kepercayaan publik untuk memenangkan kontestasi. Sebaliknya, Amran Mahmud-Amran yang melawan kekuatan dari dominasi tersebut dinyatakan berhasil mengimbangi dominasi tersebut, dan bahkan keluar sebagai pemenang. Amran Mahmud-Amran unggul dari pasangan Baso Rahmanuddin - Anwar Sadat Bin Abdul Malik dengan perolehan selisih suara sebesar 35.695 suara (KPU, 2018a).

Hasil pemilihan umum di Kabupaten Wajo tampak berbeda dengan banyak kasus lainnya di mana beberapa kasus cenderung dimenangkan oleh kandidat yang memiliki sumber ekonomi yang besar dan kekuatan politik yang kuat. Terdapat banyak kasus di mana kekuatan uang dan kekuatan politik mampu memengaruhi hasil suara di

banyak negara termasuk di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall, Rohman, Hamdi, Rubaidi, & Triantini, 2017; Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah, 2021). Dominasi ekonomi berupa uang dalam memengaruhi suara didefinisikan sebagai sebuah pertukaran untuk dukungan suara kandidat dalam pemilihan (Schedler & Schaffer, 2007). Adapun contoh kandidat dengan kekuatan ekonomi besar di Indonesia yang berhasil memenangkan pemilihan seperti Novi Rahman Hidayat di Nganjuk 2018 (Rp. 94 Miliar), Anna Muawanah di Bojonegoro 2019 (Rp. 58 Miliar), Taufan Pawe di Pare-Pare 2018 (Rp. 32 Miliar), Muslimin Bando di Sengkang 2018 (Rp. 30 Miliar) (KPK, 2020). Selain itu, kemenangan dalam pemilihan juga masih ditentukan oleh kekuatan politik seperti adanya praktek politik kartel. Tujuan utama kartelisasi yang ikut mendukung kandidat tertentu adalah untuk menjaga kepentingan mereka agar tetap berkuasa (Katz & Mair, 2009), namun demikian, terdapat harapan baru di mana kandidat yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pemilihan yaitu dengan adanya kepercayaan politik dari masyarakat terhadap kandidat. Kepercayaan tersebut datang dari komunitas masyarakat untuk melihat aktor politik yang dianggap memiliki representasi yang diharapkan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat umum (Boulianne, 2019).

Tidak banyak hasil penelitian yang berhasil menunjukkan bagaimana kandidat yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik kuat dapat keluar sebagai pemenang, khususnya di Indonesia, sehingga hal tersebut mendorong disertai ini mengambil bagian untuk mengakomodir hal tersebut. Sangat menarik melihat bagaimana kandidat yang memiliki sumberdaya yang relatif tidak seimbang tetapi berhasil memperoleh hasil suara maksimal. Kemenangan Amran Mahmud pada Pilkada Wajo 2018 juga mengindikasikan bahwa popularitas, politik kekerabatan, serta dominasi partai politik, dan sumber kekayaan yang dimiliki kandidat seperti yang dimiliki oleh

Baso Rahmanuddin bukan menjadi faktor penentu kemenangan seorang kandidat di dalam pemilihan umum, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor modal lainnya. Berdasar pada kecenderungan di atas, studi ini berupaya menganalisis kemenangan Amran Mahmud atas Baso Rahmanuddin pada kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo tahun 2018.

Studi pada disertasi ini juga didasari pada kejenuhan yang terjadi selama ini terhadap klaim tentang peluang kandidat yang memiliki modal ekonomi kuat dan politik kekerabatan dominan akan dengan mudah dapat memenangkan sebuah pemilihan (Aspinall & Berenschot, 2019; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Hal ini dapat saja diminimalisir dengan adanya modal sosial dari kandidat (Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah, 2021). Sebaliknya, disertasi dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Wajo ini cenderung berbeda dengan studi sebelumnya dengan mencermati beberapa bentuk modal lainnya dan tidak hanya bergantung pada satu atau dua bentuk modal saja. Saat ini belum banyak studi yang menganalisis bentuk-bentuk modal lebih banyak daripada yang dianalisis di dalam disertasi ini, terlebih pada kaitannya dengan studi elektoral yaitu dengan mengelaborasi enam bentuk modal sekaligus yaitu modal sosial, politik, identitas, budaya, keagamaan, dan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan sebuah pertanyaan besar tentang bagaimana kandidat yang memiliki bentuk modal politik dan modal ekonomi yang kecil berhasil keluar sebagai pemenang pada kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo 2018. Adapun pertanyaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan bentuk modal kandidat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo 2018?

2. Apakah akumulasi bentuk modal kedua kandidat memengaruhi sikap pemilih di dalam kontestasi?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung kemenangan Amran Mahmud atas Baso Rahmanuddin di Kabupaten Wajo tahun 2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana kandidat yang pada awalnya dinilai tidak memiliki modal politik dan ekonomi kuat, tetapi mampu menghasilkan suara maksimal dari populasi pemilih, bahkan keluar sebagai pemenang pada kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo 2018. Konsep yang digunakan untuk menganalisa hal tersebut yaitu dengan mengelaborasi bentuk-bentuk modal yang dimiliki oleh masing-masing kandidat dalam kontestasi politik, di mana kandidat yang terkait yakni Amran Mahmud melawan Baso Rahmanuddin pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Wajo. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui bagaimana masing-masing kandidat tersebut dapat memanfaatkan setiap bentuk modal yang dimilikinya dalam menginisiasi kepercayaan, dan memengaruhi partisipasi politik di dalam populasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Lebih lanjut, studi ini juga berupaya mengurai faktor-faktor berpengaruh lainnya yang ikut melegitimasi kemenangan Amran Mahmud atas Baso Rahmanuddin di Kabupaten Wajo pada tahun 2018.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu politik, dan sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi studi politik lokal di Indonesia, yang khusus

kaitannya dengan teori modal seperti modal sosial, budaya, identitas, keagamaan, ekonomi dan politik. Penelitian ini sekaligus dapat berkontribusi pada perkembangan *khazanah* keilmuan terutama dalam kajian literatur terkait modal kedepannya. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi peneliti lain dalam mengambil tema yang sama terkait modal dan kontestasi di dalam pemilihan demokratis.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian disertasi ini menganalisis kemenangan Amran Mahmud-Amran, khususnya Amran Mahmud dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wajo 2018. Konsep modal (Capital), dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu modal pada dimensi sosial (jaringan sosial dan komunikasi), dimensi budaya (Latar belakang pendidikan, keluarga, dan status sosial), dimensi identitas (Jenis kelamin, usia, etnis), dimensi keagamaan (Agama, perilaku keagamaan, jejaring keagamaan, dukungan Tokoh Agama), dimensi ekonomi (*Cost* politik dan harta kekayaan), dan dimensi politik (dukungan partai politik, tim pemenangan, elit politik atau elit lokal).